

ABSTRAK

Berdasarkan data *International Labour Organization (ILO)*, persentase produktivitas tenaga kerja di Indonesia pada Tahun 2024 tergolong rendah dari beberapa negara di ASEAN, seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia berada pada urutan kelima. Angka tersebut tergolong rendah dari rata-rata negara di kawasan ASEAN yang memperoleh US\$ 24.27 pada masing-masing tenaga kerja. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan urutan ke-29 dengan angka 57,08 dari total 38 provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai usaha dalam mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor industri, manufaktur, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan program pelatihan peningkatan produktivitas di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada pengelolaan program pelatihan peningkatan produktivitas terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2018. BLKPP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kepatuhan tinggi melalui interaksi kepemimpinan yang bersifat *top-down*, bersumber dari struktur hierarki, serta faktor komunikasi melalui koordinasi. Pada tahap Pengelolaan program pelatihan cukup baik karena pada tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan program memiliki desain strategis yang matang, artinya pengelolaan dilakukan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Namun, pada tahap pelaksanaan membutuhkan penyempurnaan. Hal ini membuktikan adanya kesenjangan pelaksanaan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun program telah disusun dengan baik, namun adanya perubahan dari rencana ke aksi nyata yang memiliki beberapa tantangan signifikan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan, Program Pelatihan Peningkatan Produktivitas

ABSTRACT

Based on data from the International Labor Organization (ILO), the percentage of labor productivity in Indonesia in 2024 is relatively low compared to several other countries in ASEAN, such as Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, and Thailand. Indonesia ranks fifth. This figure is lower than the average for ASEAN countries, which stands at US\$ 24.27 per worker. The Special Region of Yogyakarta ranks 29th with a figure of 57.08 out of a total of 38 provinces in Indonesia. Therefore, the government has undertaken various efforts to boost labor productivity in the industrial, manufacturing, and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sectors. This study aims to analyze the implementation of policies for managing productivity enhancement training programs at the Vocational Training and Productivity Development Center (BLKPP) in the Special Region of Yogyakarta. This study uses a qualitative descriptive method through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of policies on the management of productivity improvement training programs is stipulated in Governor Regulation No. 92 of 2018. BLKPP, as a Technical Implementation Unit (UPT) of the Manpower and Transmigration Office, has high compliance through top-down leadership interactions, sourced from hierarchical structures, and communication factors through coordination. The management of the training program is quite good because the planning, organizing, and monitoring stages of the program have a well-developed strategic design, meaning that management is carried out in accordance with the planned objectives. However, the implementation stage requires improvement. This proves that there is a gap in implementation. This gap indicates that although the program has been well-designed, there are significant challenges in translating the plan into actual action.

Keywords: Policy Implementation, Management, Productivity Improvement Training Programs